

LAPORAN TAHUNAN HASIL PENGELOLAAN SP4N LAPOR! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM SP4N-LAPOR!

- 1. Latar Belakang
- 2. Dasar Hukum
- 3. Tujuan SP4N-LAPOR!

BAB II PENGELOLAAN SP4N-LAPOR! DI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

- 1. Rekapitulasi Pengaduan
 - a. Materi dan Kategori Pengaduan
- 2. Kinerja Pengelolaan Pengaduan
 - a. Persentase Penyelesaian Pengaduan
 - b. Rata-rata Waktu tindak lanjut pengaduan
- 3. Rencana Kegiatan Pengelolaan Pengaduan
- 4. Laporan Ringkas

BAB III PENUTUP

BAB I

GAMBARAN UMUM SP4N LAPOR

1. Latar Belakang

Layanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dikelola oleh MENPAN RB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Melalui SP4N LAPOR! Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan pelayanan publik dengan tujuan :

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka penguatan terlaksananya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerapkan pelayanan SP4N-Lapor! untuk mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengaduan melalui SP4N LAPOR memiliki dasar hukum sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan
 Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Nasional (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1170);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 27);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023
 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah .

3. Tujuan

SP4N-LAPOR! dirancang untuk memastikan tidak ada pintu pengaduan yang salah arah atau terputus. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir salah dalam melaporkan, karena pengaduannya akan disalurkan ke pihak yang tepat untuk ditindaklanjuti.

Tujuan penerapan SP4N-LAPOR! di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan turut memberikan akses partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal. Penerapan sistem SP4N-LAPOR! ini juga dapat mengintegrasi setiap pengaduan maupun aspirasi masyarakat secara cepat dan tuntas.

BAB II

PENGELOLAAN SP4N-LAPOR!

DI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

1. Rekapitulasi Pengaduan

A. Materi dan Kategori Pengaduan

Materi dan kategori pengaduan yang diterima oleh Admin Instansi SP4N LAPOR! Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2024 (1 Januari s/d 31 Desember 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Materi	Jumlah							
1.	Gaji dan tukin	4							
2.	Gaji Pekerja	10							
3.	Gaji/Upah dibayarkan tidak tepat waktu	1							
4.	Hak Pekerja	2							
5.	Kehutanan	1							
6.	Kualitas Pelayanan Kesehatan	1							
7.	Pungutan Liar	1							
8.	Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2							
9.	Lainnya terkait Kepegawaian	1							
10.	Pencemaran Lingkungan	1							
11.	Lainnya terkait Ketenagakerjaan	1							
12.	Topik Lainnya	1							
13.	Pungutan Liar	1							
14.	SP4N-LAPOR!	2							
	Total Pengaduan 29								

No.	Kategori Pengaduan	Jumlah						
1.	Pengaduan Berkadar Pengawasan	10						
2.	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	10						
	Total							

2. Kinerja Pengelolaan Pengaduan

A. Presentase Penyelesaian Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui SP4N LAPOR! sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 29 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

Total Pengaduan	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Tunda	Arsip	Presentase Penyelesaian Pengaduan
29	0	19	0	6	4	0%

B. Rata-rata Waktu Penyelesaian Pengaduan

Sesuai dengan statistik SP4N LAPOR! rata-rata waktu penyelesaian pengaduan atau laju verifikasi adalah 0 hari.

3. Rencana Kegiatan Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR! dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu beberapa hal yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang antara lain :

- a. Sosialisasi kepada OPD-OPD dan masyarakat tentang pemanfaatan SP4N
 LAPOR! melalui website dan media sosial resmi Pemerintah Provinsi
 Maluku Utara;
- Sosialisasi Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
 Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
 Daerah bagi Pimpinan OPD sesuai dengan ketersediaan anggaran;

- Revitalisasi kelembagaan pengelola pengaduan di lingkungan
 Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 8
 Tahun 2023;
- d. Optimalisasi proses verifikasi dan disposisi pengaduan yang lebih koordinatif dan kolaboratif.

4. Laporan Ringkas

Berikut tabel laporan ringkas pelaksanaan SP4N LAPOR! tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara :

No.	Tanggal Laporan Masuk	Nama Pelapor	Klasifikasi Laporan	Kategori	Judul Laporan	Isi Laporan Awal	Status Laporan
1	25 Mar 2024		Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kehutanan	Usir Pt. Forward Matrix Indo (Fmi)	KAMI DARI OKK, IKATAN PELAJAR MAHASISWA SUBAIM (IPMS), MENGECAM KERAS ATAS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN OLEH PT. FMI, YANG SANGAT MERUGIKAN MASYARAKAT SUBAIM, WAISUBA DAN CEMARA JAYA. PT. FMI MELANGGAR IUP YANG SUDAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH. DI DESA CEMARA JAYA, TAPI PT. FMI KELUAR JAUH DARI WILAYAH IJIN, DAN MEMILIH MENAMBANG DI DESA SUBAIM YANG TIDAK ADA IJIN USAHA PERTAMBANGAN SAMA SEKALI.DAN JUGAH TDK ADA SAMA SEKALI.DAN JUGAH TDK ADA SAMA SEKALI ANALISA LINGKUNGAN NYA, KARENA AKTIVITAS MENAMBANG PT. FMI DEKAT SAMA SUBAIM KAMPONG, RT 8. BERJARAK HANYA 100 METER DARI PEMUKIMAN MASYARAKAT. UNTUK ITU KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH PUSAT DALAM LEMBAGA YANG DITUJU AGAR SEGERA BENTUK TIM UNTUK MENGEVALUASI PT. FMI	Terverifikasi
2	2 Jan 2024		Pengaduan Berkadar Pengawasan	Topik Lainnya	Gaji PPPK dipakai untuk bayar TTP dan Gaji Guru Honor	Assalamualaikum Saya ingin melaporkan bahwa di Provinsi Maluku utara Gaji PPPK yang semestinya Earmaking atau tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain, malah digunakan untuk membayar TTP PNS dan Gaji Guru Honor, sementara kami PPPK tahun 2022 pengangkatan 2023, yg pada tgl 2 oktober 2023 Kemarin menerima SK, sampai saat ini belum menerima	Menunggu Kelengkapan Informasi

	1	1			T	gaji padahal DAU dari Pemerintah Pusat sudah di	1
						Transfer Ke Pemprov. Maluku Utara.	
3	5 Jan 2024		Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pungutan Liar	Pemalakan Uang Untuk Penyuapan Pns	Pemalakan sejumlah uang untuk penyuapan kepada pegawai PNS provinsi maluku utara, hal ini dilakukan oleh oknum PPPK RSU TERNATE yang bernama Diman dan Nuniwiranti untuk me muluskan pencairan HAK PPPK NAKES RSU Ternate. mereka mengumpulkan sejumlah uang kepada pegawai PPPK RSU Ternate dengan dalih uang sumbangsi. nyatanya uang tersebut di gunakan untuk menyogok atau menyuap pegawai PNS provinsi dengan tujuan memuluskan pencairan tunjangan rapel PPPK NAKES. padahal itu adalah HAK PPPK yg tanpa perlu di sogok pun harus di bayarkan.	Terverifikasi
4	10 Jan 2024		Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pengaduan Pelaksanaan Tes Kesehatan Jiwa Di Rsj Sofifi Provinsi Maluku Utara	Pelaksanaan tes kesehatan jiwa yang tidak sesuai dengan PMKRI No. 29 Tahun 2022. Pada saat pelaksanaan tes berlangsung pada ruangan yang tidak memadai di dalam RSJ Sofifi, yang mana ruangan pelaksanaan tes minim penerangan dan pelaksanaan tes dilakukan dalam keadaan berdesak-desakan yang membuat tidak nyaman ditambah dengan kondisi bangunan yang mengkhawatirkan dikarenakan plafon pada langitlangit bangunan sudah bolong dan terlihat bekas jatuh yang tentunya mengancam keselamatan peserta tes dan semua yang ada didalam ruangan dan juga dilaksanakan tanpa adanya sarana prasarana yang memadai seperti tidak tersedianya meja dan tester memberikan intruksi yang kurang jelas dan sepertinya tester juga tidak memahami alat tes yang dilaksanakan sehingga tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan tes dalam hal ini testee dalam mengerjakan soal dan pastinya hasil yang didapatkan dari tes tersebut tidak maksimal. pelaksaan tes juga tidak melibatkan psikolog atau profesi yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan tes kesehatan jiwa	Terverifikasi

					karena begitu saya konfirmasi bahwa yang melaksanakan tes tersebut adalah dokter umum yang tentunya tidak masuk dalam klasifikasi didalam PMKRI No. 29 Tahun 2022 yang mana pada pasal 10 bahwa Tim Pemeriksa paling sedikit berjumlah 2 orang yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis. Selain itu didalam Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa pada pasal 11 bahwa yang dilakukan di RSJ Sofifi yang hany menggunakan alat tes tunggal yakni MMPI itu tidak bisa dijadikan acuan pemeriksaan jiwa karena harus dilengkapi dengan pemeriksaan profil kecerdasan dan pemeriksaan profil kepribadian sehingga terdapat 3 (tiga) pemeriksaan.	
5	16 Jan 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Tidak menerima gaji PPPK Nakes Maluku Utara dari juni 2023 hingga januari 2024	Saya atas nama Ekobaidila Jamal dinyatakan lulus PPPK Nakes Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan menerima SK juni 2023 tapi tidak di gaji dari bulan juni 2023 hingga sekarang bulan januari 2024, saya sudah coba menanyakan ke bendahara dinas kesehatan provinsi maluku utara dan pegawai bagian keuangan di provinsi maluku utara tapi hanya JANJI palsu yang saya terima. gaji tak kunjung di terima. padahal saya aktif bekerja sebagai perawat di RSU TERNATE.	Diarsipkan oleh Admin
6	16 Jan 2024	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Tidak Menerima Gaji Pppk Nakes Maluku Utara Dari Juni 2023 Hingga Januari 2024	Saya atas nama Ekobaidila Jamal dinyatakan lulus PPPK Nakes Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan menerima SK juni 2023 tapi tidak di gaji dari bulan juni 2023 hingga sekarang bulan januari 2024, saya sudah coba menanyakan ke bendahara dinas kesehatan provinsi maluku utara dan pegawai bagian keuangan di provinsi maluku utara tapi hanya JANJI palsu yang saya terima. gaji tak kunjung di terima. padahal saya aktif bekerja sebagai perawat di RSU TERNATE.	Terverifikasi
7	20 Jan 2024	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji dan Tukin	Tidak digaji PPPK Nakes Maluku Utara dari april 2023 hingga januari 2024	Saya Ekobaidila Jamal dinyatakan lulus PPPK Nakes Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan menerima SK april 2023 tapi tidak di gaji dari bulan	Diarsipkan oleh Pelapor

						april 2023 hingga sekarang bulan januari 2024, saya sudah coba menanyakan ke bendahara dinas kesehatan provinsi maluku utara dan pegawai bagian keuangan di provinsi maluku utara tapi hanya JANJI palsu yang saya terima. gaji tak kunjung di terima. padahal saya aktif bekerja sebagai perawat di RSUD Dr.H.Cahasan Boesoirie Ternate.	
8	25 Jan 2024	Aeo Nian	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji dan Tukin	Tidak Menerima Gaji Pppk Nakes Maluku Utara Dari April 2023 Hingga Januari 2024	Saya atas nama Ekobaidila Jamal dinyatakan lulus PPPK Nakes Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan menerima SK juni 2023 tapi tidak di gaji dari bulan april 2023 hingga sekarang bulan januari 2024, saya sudah coba menanyakan ke bendahara dinas kesehatan provinsi maluku utara dan pegawai bagian keuangan di provinsi maluku utara tapi hanya JANJI palsu yang saya terima. gaji tak kunjung di terima. padahal saya aktif bekerja sebagai perawat di RSUD Dr.H.Cahasan Boesoirie Ternate.	Terverifikasi
9	25 Jan 2024	Aeo Nian	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji dan Tukin	Tidak Menerima Gaji Pppk Nakes Maluku Utara	Saya atas nama Ekobaidila Jamal dinyatakan lulus PPPK Nakes Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan menerima SK juni 2023 tapi tidak menerima gaji dari bulan april 2023 hingga sekarang bulan januari 2024, saya sudah coba menanyakan ke bendahara dinas kesehatan provinsi maluku utara dan pegawai bagian keuangan di provinsi maluku utara tapi hanya JANJI palsu yang saya terima. gaji tak kunjung di terima. padahal saya aktif bekerja sebagai perawat di RSUD Dr.H.Cahasan Boesoirie Ternate.	Terverifikasi
10	25 Jan 2024	Kocheng96	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji dan Tukin	PPPK	Assalamualaikum wr wb Sehubungan dengan PPPK NAKES Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 mohon di tinjau kembali peserta atas nama EKOBAIDILA JAMAL. dikarenakan peserta tersebut tidak menerima Gaji dari bulan april 2023 hingga januari 2024. Mohon untuk di telusuri. dikarenakan peserta tersebut aktif bekerja di RSU	Diarsipkan oleh Admin

						TERNATE sebagai PPPK NAKES namun tidak menerima gaji dari PPPK.	
11	6 Feb 2024	Kocheng96	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	РРРК	Assalamualaikum wr wb Sehubungan dengan PPPK NAKES Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 BKN mengeluarkan SK pada peserta atas nama EKOBAIDILA JAMAL. per tanggal 1 April 2023 tetapi, peserta tersebut tidak menerima Gaji hingga sekarang februari 2024 Mohon untuk di tinjau kembali, dikarenakan peserta PPPK Nakes yang se angkatan sudah menerima gaji. dan juga peserta tersebut aktif bekerja di RSU TERNATE sebagai perawat.	Diarsipkan oleh Admin
12	6 Feb 2024	Kocheng96	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Pppk Nakes 2023	Assalamualaikum wr wb mohon di tinjau PPPK NAKES Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 BKN mengeluarkan SK pada peserta atas nama EKOBAIDILA JAMAL. per tanggal 1 April 2023 tetapi, peserta tersebut tidak menerima Gaji hingga sekarang februari 2024 Mohon untuk di tinjau kembali, dikarenakan peserta PPPK Nakes yang se angkatan sudah menerima gaji. dan juga peserta tersebut aktif bekerja di RSU TERNATE sebagai perawat. tetapi tidak menerima gaji	Terverifikasi
13	13 Feb 2024	Alif Akbar	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji/Upah dibayarkan tidak tepat waktu	Keterlambatan Gaji Guru Asn Pemprov Maluku Utara	Assalamu Alaikum Wr.Wb.,Kepada Yth, Kepala BPKAD Pemprov Maluku Utara, Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Maluku Utara. di tempatsaya salah satu ASN Guru di Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara saat ini mengeluhkan keterlambatan gaji yang sering terjadi berulang-ulang. gaji masuk kerekening pegawai selalu diatas tgl 7 bulan berjalan. rata rata selalu terjadi pencairan gaji masuk kerekening diminggu ke-2 tiap bulan berjalan bahkan pernah terjadi pada minggu ketiga. apakah pencairan gaji ini tidak bisa dilaksanakan tepat waktu berhubung kami kadang punya tagihan jatuh tempo cicilan diawal bulan. terima kasih	Terverifikasi

14	7 Mar 2024	Kocheng96	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Tidak Di Menerima Gaji Selama 11 Bulan P3K Nakes	mohon di tinjau atas nama EKOBAIDILA JAMAL pegawai PPPK tahun 2022 tidak menerima gaji selama 11 bulan. sudah melakukan pengurusan berkas secara lengkap dan PPPK Nakes tahun 2022 yang lain sudah menerima gaji namun pegawai atas nama EKOBAIDILA JAMAL tidak menerima gaji selama 11 bulan	Terverifikasi
15	7 Mar 2024	Kocheng96	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Pppk Nakes Tidak Di Gaji Selama 11 Bulan	Mohon di tinjau kepala BKN PNS atas nama AHMAD PURBAYA jabatan kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara tidak memberikan hak GAJI selama 11 bulan kepada PPPK NAKES atas nama EKOBAIDILA JAMAL	Terverifikasi
16	23 Apr 2024	SALMAN HATAUL	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tentang cuti tahunan	Cuti tahunan saya tidak dikasi dan tertunda selama 7 bulansetiap bulan saya melakukan pengajuan cuti namun tidak pernah di proses pihak perusaha'an padahal itu adalah hak kariawan pak!	Menunggu Kelengkapan Informasi
17	22 Apr 2024	SALMAN HATAUL	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tentang cuti tahunan	Cuti tahunan saya tidak dikasi dan tertunda selama 7 bulansetiap bulan saya melakukan pengajuan cuti namun tidak pernah di proses pihak perusaha'an padahal itu adalah hak kariawan pak!	Menunggu Kelengkapan Informasi
18	7 May 2024	wahyunim Saleh83	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Lainnya terkait Kepegawaian	Tentang Kenaikan Pangkat	Saya adalah salah satu ASN dengan jabatan fungsional yaitu Guru,,dsni saya mau mengadukan masalah pangkat saya yg sudah saya usulkan d bulan Januari,tapi pada hari ini dari pihak diknas mengatakan saya tidak lagi di izinkan untuk naik pangkat dikarenakan saya belum S1,kira"bagaiman pakapakah aturan terbaru guru yang belum S1 tidak bisa lagi mengusul pangkat,,mohon penjelasannya pak/ibu	Terverifikasi
19	17 May 2024	Didin	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Hak Pekerja	Jatah cuti perusahaan	Assalamualaikum wr wbselamat siang, sehat selalu untuk kita semua. Perihal Laporan yang saya ajukan ini terkait adanya indikasi ketidakjujuran dari perusahaan swasta yang memotong jatah cuti dengan sepihak. Jadi dari pihak kantor memotong jatah cuti pekerja bilamana ada tanggal merah di hari yg bukan hari	Menunggu Kelengkapan Informasi

						libur kantor (minggu). Contoh hari selasa tanggal merah, dianggap jatah cuti sudah diambil karena bukan hari libur	
20	29 May 2024	Aad Aldy Madjit	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pencemaran Lingkungan	Minta Informasi Soal Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (Rkab) Pt Terrarex Lumina Jaya	KAMI INGIN TAHU APAKAH PERUSAHAAN PT TERRAREX LUMINA JAYA YANG JENIS PERIZINAN IUP MASIH BERLAKU ATAU TIDAK, KARENA SEJAK MELAKUKAN EKSPOLORASI TAHUN 2018, DI DESA KAMI AKELAMOKAO, KECAMATAN KAO TELUK, KAB HALMAHERA UTARA DAN DESA AKELAMO CINGA-CINGA, KECAMATAN JAILOLO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PROV MALUKU UTARA, MEREKA TIDAK LAGI MELAKUKAN AKTIFITAS PERTAMBANGANNYA SEPERTI PERUSAHAAN LAINNYA YANG SEDIANYA HARUS DILANJUKAN DENGAN EKSEN PRODUKSI DI LAHAN 6.099,60 HA, DENGAN KOMODITAS EMAS. PERUSAHAAN TERSEBUT SUDAH FAKUM SEJAK LAMA DARI TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2024 INI	Terverifikasi
21	3 Jun 2024	Moh Zulkifli Kamal W Taher	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Keterlambatan Pembayaran Upah Perjalanan Dinas (Luar Kota)	Pembayaran upah perjalanan dinas/luar kota tidak dibayarkan selama 2 bulan (april-mei) dan tidak sesuai perhitungan. Dan selalu adanya keterlambatan secara terus menerus oleh pihak vendor, yakni PT.PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA cabang kantor perwakilan di KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA.	Terverifikasi
22	8 Jun 2024	Marini Juantari	Pengaduan Berkadar Pengawasan	SP4N-LAPOR!	Diskriminasi Pekerja Tka Cina Terhadap Pekerja Lokal Indonesia	Di Perusahaan HARITA Group di Provinsi Maluku Utara, Pulau Obi Halmahera Selatan terdapat banyak diskriminasi terhadap pekerja lokal, dan pekerja asing yang datang serta bekerja di Indonesia, Tindakan Pekerja yang selalu mem PHK pekerja lokal semena-mena tanpa alasan dan bukan karena hal effesiensi biaya, tapi menggantikan pekerja yang di PHK dengan pekerja Asing dengan gaji yang lebih besar, serta pekerja asing yang baru lulus kuliah (Management Trainee Fresh Graduate) diberikan tanggung	Terverifikasi

						jawab dan kedudukan lebih tinggi dari pekerja lokal yang berpengalaman, hal ini menyebabkan ketidak adilan, dan akan bisa menyebabkan kerusuhan, dan banyaknya pekerja asing yang tidak memiliki skill dan menjadi buruh kasar membuat dampak yang tidak baik bagi warga sekitar atau pekerja lokal, serta porsi pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka dengan sengaja membuat semua peralatan dengan tulisan china supaya Pekerja Tenaga Lokal tidak bisa belajar dan memahami operasional dan perbaikan peralatan, Karyawan Tenaga Kerja Asing semena-mena karena di perusahaan yang jumlah melebihi 5000 pekerja tidak ada Organisasi Serikat Pekerja, bahkan Pekerja asing TKA bertindak sebagai personalia, bahkan beberapa kali tindakan pelecehan seksual yang di lakukan oleh TKA cina terhadap pekerja wanita lokal berakhir hanya mutasi department	
23	13 Jun 2024	Denny Elvras Jaya	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Gaji Dan Kompensasi Perpanjangan Kontrak	Hallo, saya Ex Karyawan PT Sarana Baja Perkasa Site HSM KM 27 salah satu Kontraktor Pertambangan Mineral (Nikel) yang berada dilokasi IWIP Halmahera Tengah. Aduan saya terkait laporan sisa pembayaran gaji bulan Mei 2024 sampai saat ini belum juga dibayarkan dan juga terkait kompensasi perpanjangan kontrak/PKWT dari awal masuk Februari 2020 hingga saat ini masih belum dibayarkan juga. Mohon dibantu terkait Hak saya sebagai Pekerja Kontrak yang dimana sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.	Terverifikasi
24	23 Sep 2024	Atmaja Kader	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Lainnya terkait Hak Pekerja	Hak Kariawan Tidak Di Berikan	CV.Ternate Elektronik Grouptidak memberikan Hak kariawan Berupa pesangon dan lain".perusahaan mendaftarkan BPJS tidak sesuai gaji dan jam kerja perusahaan	Terverifikasi
25	22 Sep 2024	Fatima	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Hak Pekerja	Pt Hillcon	Melakukan pekerjaan roaster, tetapi cuti tidak sesuai dengan peraturan pemrintah yg sudah ditetapkan, diminta untuk membantu kebutuhan	Terverifikasi

						man power, tetapi saat sesuai perjanjian akan cuti, dipersulit.	
26	5 Nov 2024	Umardin	Pengaduan Berkadar Pengawasan	SP4N-LAPOR!	Pemenang Tender Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Auditorium, Meeting Zooom Dan Ruang Kerja Pimpinan Dprd Maluku Utara, Tidak Memiliki Sbu	Setiap Badan Usaha yang mengikuti tender pada bidang jasa pelaksana konstruksi dan usaha jasa, wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sebagai bukti pengakuan formal terhadap tingkat kompetensi atas hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Namun sangat di sayangkan bahwa CV. RADJAH RIZKI selaku pemenang tender/pemenang berkontrak Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Auditorium, Meeting Zooom Dan Ruang Kerja Pimpinan DPRD Maluku Utara, Tidak Memiliki SBU.Untuk itu, diminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan pemutusan kontrak, sebagaimana surat kami terlampir yang di sertai bukti. dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.	Terverifikasi
27	9 Nov 2024	Beriman Siallagan	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Lainnya terkait Ketenagakerjaan	Pelanggaran Hak Pekerjaan Oleh Perusahaan	Potongan uang makan yang tidak sesuai perjanjianJam kerja yang melebihi peraturanMakanan yang tidak layakApd yang tidak layakMes yang tidak memadai	Menunggu Kelengkapan Informasi
28	6 Dec 2024	denny Tomasoa Shanti	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Potongan Gaji Yang Merugikan Karyawan	Mohon di tindak pemotongan gaji karyawan yang sangat tidak berpihak dikaryawan	Menunggu Kelengkapan Informasi
29	13 Dec 2024	Adhi Purnomo	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Gaji Pekerja	Hak Gaji Beserta Jht Yang Belum Diselesaikan Perusahaan	Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adhi Purnomo. Saya adalah ex karyawan swasta dari perusahaan PT NUSA HALMAHERA MINERALS yang beroperasi di site Gosowong, Maluku Utara. Saya ingin melaporkan Pak, dimana saya sudah berakhir kontrak kerja per bulan Mei 2024. Namun hak gaji saya belum terselesaikan sepenuhnya, dan di bulan ini (Desember 2024) sudah memasuki 3 bulan berturut-turut hak gaji saya	Terverifikasi

|--|

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi

dan perbaikan demi peningkatan kinerja SP4N LAPOR! Pemerintah Provinsi

Maluku Utara pada tahun berikutnya.

Adapun masukan dan saran sangat diperlukan dalam pengelolan

pengaduan SP4N LAPOR!.

Sofifi, 6 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara

Dr. IKSAN R.A. ARSAD, M.Si

NIP. 197011041989021001